



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2024



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan juga sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*, serta sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi.

Besar harapan kami bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai informasi maupun evaluasi kinerja bagi Pemerintah Kabupaten Purworejo.

Purworejo, 29 Januari 2025
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Purworejo



Gathot Suprpto, S.H.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19661223 199403 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Profil Organisasi	3
1.3.1 Budaya Kerja Kabupaten Purworejo	3
1.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi	4
1.3.3 Sumber Daya Manusia	4
1.3.4 Sumber Daya Anggaran	6
1.4 Aspek dan Isu Strategis Perangkat Daerah	7
1.4.1 Aspek Strategis	7
1.4.2 Isu Strategis Perangkat Daerah	7
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja PD	9
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan 2024	10
2.3 Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024	10
2.4 Perjanjian Kinerja tahun 2024	17
2.5 Hasil Tindak Lanjut Tahun 2023	28
2.6 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	31
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	32
3.1 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2024	32
3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2024	46
3.3 Inovasi	49
3.4 Penghargaan	50
BAB IV PENUTUP	52
4.1 Kesimpulan Umum atas Capaian Kinerja.....	52
4.2 Rencana Tindak Lanjut	52
LAMPIRAN	54

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rincian Anggaran 2024	9
Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Tahun 2024	12
Tabel 2.2 Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DPMPTSP 2024	17
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Eselon II Tahun 2024	18
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Eselon III Tahun 2024	21
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Eselon IV Tahun 2024.....	28
Tabel 2.6 Hasil Tindak Lanjut Tahun 2023.....	32
Tabel 3.1 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan.....	32
Tabel 3.2 Target dan Realisasi.....	32
Tabel 3.3 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 1 : Realisasi Penanaman Modal	33
Tabel 3.4 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 2 : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	39
Tabel 3.5 Capaian Kinerja Tahun 2024.....	45

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan bahwa negara wajib melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan umum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sektor, terutama yang menyangkut pemenuhan hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat, kinerjanya masih belum seperti yang diharapkan. Kurangnya kinerja pelayanan publik ini antara lain dikarenakan belum dilaksanakannya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh karena itu pelayanan publik harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel oleh setiap unit pelayanan instansi pemerintah, karena kualitas kinerja birokrasi pelayanan publik memiliki implikasi yang luas dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu diperlukan Laporan LKjIP dan Perjanjian Kinerja yang berisi dokumen penugasan dan pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai indikator kinerja, diharapkan melalui perjanjian kinerja tersebut terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang sumber daya yang tersedia, sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dipergunakan sebagai pedoman bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun perjanjian kinerja.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo merupakan salah satu Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Purworejo yang menyelenggarakan pelayanan publik di bidang administrasi perizinan, telah berusaha untuk menyelenggarakan pelayanan publik secara

trasparan dan akuntabel sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, namun demikian kami menyadari bahwa didalam penyelenggaraan pelayanan publik masih perlu adanya pembenahan sehingga di harapkan adanya peningkatan kualitas pelayanan kepada Masyarakat

1.2 Maksud dan Tujuan

1) Maksud

Maksud dibuat dan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo untuk tahun 2023 ini, adalah dimaksudkan untuk melaporkan kinerja tahunan baik kepada atasan maupun kepada publik, yang berisi pertanggungjawaban kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo dalam mencapai tujuan/sasaran strategis sesuai dengan yang digariskan dalam RPJMD Kabupaten Purworejo.

2) Tujuan

Adapun tujuan dibuat dan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo ini adalah:

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat yaitu Bupati Purworejo atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo;
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo untuk meningkatkan kinerja;
- c. Menciptakan sistem akuntabilitas kinerja di instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo.

1.3 Profil Organisasi

1.3.1 Budaya Kerja Kabupaten Purworejo

Budaya kerja dimaksudkan sebagai salah satu instrumen reformasi birokrasi yang dilaksanakan secara sistematis melalui penggalian, perumusan, dan penerapan Nilai Budaya Kerja ke dalam pola pikir, pola perilaku dan pola tindakan secara konsisten, konsekuen, dan kontinyu dalam rangka kelancaran, daya guna dan hasil guna pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Budaya Kerja bertujuan untuk:

- a. Meneguhkan jiwa korps dan kode etik Pegawai Negeri Sipil;
- b. Meningkatkan pemantapan tata kelola organisasi;
- c. Mendorong peningkatan profesionalitas Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan beban kerja dan tanggungjawabnya;
- d. Memperkuat corak pemerintahan daerah bersendikan karakter budaya lokal.

Nilai Budaya Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yaitu bersih, ikhlas, melayani, akuntabel dan profesional yang disebut "BERIMAN-PROFESIONAL". Nilai Budaya Kerja "BERIMAN-PROFESIONAL" mengandung maksud sebagai berikut:

- a. Bersih mengandung arti bersih dalam berpikir, bertindak, dan bekerja, mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Ikhlas yaitu dalam norma etika dan agama dapat diartikan rela sepenuh hati, datang dari lubuk hati, tidak mengharapkan imbalan atau balas jasa atas suatu perbuatan, khususnya yang berdampak positif pada orang lain, dan semata-mata karena menjalankan tugas/amanah demi Tuhan Yang Maha Kuasa;
- c. Melayani yaitu memberikan pelayanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, akurat, berdaya guna dan berhasil guna yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan;
- d. Akuntabel yaitu dalam melaksanakan tugas dapat mempertanggungjawabkan baik segi proses maupun hasil;
- e. Profesional yaitu dalam melaksanakan tugas selalu menyelesaikan secara baik, tuntas, dan sesuai kompetensi/keahlian, orang yang

terampil, andal dan sangat bertanggungjawab dalam menjalankan profesinya.

1.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan bidang penanaman modal sesuai dengan kewenangan Daerah yang meliputi penanaman modal, perizinan dan data, sistem informasi dan pengaduan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan dan perumusan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

1.3.3 Sumber Daya Manusia

Susunan Kepegawaian dan Kelengkapan Karyawan / Karyawati pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo terdiri dari PNS sebanyak 14 (empat belas) pegawai yang terdiri dari 8 (delapan) pegawai laki-laki dan 6 (enam) pegawai perempuan dengan klasifikasi sebagai berikut :

Golongan IV : 2 orang

❖ IV/a	: - orang
❖ IV/b	: 1 orang
❖ IV/c	: 1 orang
Golongan III	: 6 orang
❖ III/a	: 3 orang
❖ III/b	: 1 orang
❖ III/c	: 2 orang
❖ III/d	: - orang
Golongan II	: 2 orang
❖ II/a	: - orang
❖ II/b	: - orang
❖ II/c	: - orang
❖ II/d	: 2 orang
Golongan I	: 2 orang
❖ 1/a	: - orang
❖ 1/b	: - orang
❖ 1/c	: - orang
❖ 1/d	: 2 orang
Golongan IX	: 2 orang
Golongan VII	: 1 orang
Total	:15 orang

Berdasarkan Pendidikan

❖ SD	: 2 orang
❖ SLTP	: - orang
❖ SLTA	: 1 orang
❖ D2	: - orang
❖ D3	: 4 orang
❖ D4	: - orang
❖ S1	: 7 orang
❖ S2	: 1 orang

Diklat Penunjang

- ❖ Pimpinan Tk. II : 1 orang
- ❖ Pimpinan Tk. III : - orang
- ❖ Pimpinan Tk. IV : 2 orang

Diklat Teknis

- ❖ PTSP Bidang PM Tk. Pertama : 5 orang
- ❖ PTSP Bidang PM Tk. Lanjutan : 5 orang
- ❖ PTSP Bidang PM Tk. Sektoral : 2 orang
- ❖ Diklat IMB : 2 orang
- ❖ Diklat SPIP : 1 orang
- ❖ Penerapan Akuntansi berbasis Akrual : 3 orang
- ❖ Diklat kearsipan : 2 orang

1.3.4 Sumber Daya Anggaran

Pada tahun anggaran 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan DPA SKPD Nomor DPA/A.1/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2024 dan DPPA SKPD DPPA/A.3/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2024 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 4.129.740.882,00 dengan rincian anggaran sebagai berikut :

Tabel 1.1 Rincian Anggaran Tahun 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Belanja Pegawai	
	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.023.783.083,00
	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	575.438.214,00
2.	Belanja Barang dan Jasa	
	Belanja Barang	341.735.285,00
	Belanja Jasa	1.053.172.300,00
	Belanja Pemeliharaan	101.345.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas	934.267.000,00
	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	100.000.000,00

1.4 Aspek dan Isu Strategis Perangkat Daerah

1.4.1 Aspek Strategis

Aspek strategis yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo antara lain :

1. Rencana Strategis tahun 2021 – 2026 DPMPTSP;
2. Rencana Kerja Tahunan tahun 2024;
3. Perjanjian Kinerja tahun 2024

1.4.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Perumusan kriteria strategis berdasarkan tujuan pembangunan daerah bidang Penanaman Modal adalah:

- 1) Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik semakin tinggi. Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan yang adil, transparan dan akuntabel benar-benar dibutuhkan masyarakat sehingga perlu diwujudkan dan ditingkatkan secara konsisten;
- 2) Pengembangan promosi potensi investasi diharapkan dapat menarik para investor untuk menanamkan modalnya atau berinvestasi di Kabupaten Purworejo;
- 3) Perlu penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) baik secara kualitas maupun kuantitas.

1.5 Sistematika Penulisan

a. Bab I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan, profil organisasi, aspek dan isu strategis Perangkat Daerah, dan sistematika penulisan;

b. Bab II Perencanaan Kinerja

Berisi tentang tujuan, sasaran dan indikator Perangkat Daerah, strategi dan arah kebijakan 2024, struktur program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024, perjanjian kinerja tahun 2024, hasil tindak lanjut tahun 2023 dan instrumen pendukung capaian kinerja;

- c. Bab III Akuntabilitas Kinerja
Berisi tentang analisis capaian kinerja tahun 2024, realisasi anggaran tahun 2024, inovasi dan penghargaan;
- d. Bab IV Penutup
Berisi tentang kesimpulan umum atas capaian kinerja dan rencana tindak lanjut;
- e. Lampiran

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja PD

Indikator kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan indikator kinerja yang berada pada perspektif manfaat bagi *stakeholders* yang menunjukkan peran utama DPMPTSP dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan serta penyelenggaraan pelayanan urusan bidang penanaman modal. Indikator Kinerja Utama terbagi menjadi dua perspektif, yang pertama bersifat *outward looking* yaitu perspektif manfaat langsung bagi *stakeholders* eksternal yang menunjukkan peran utama DPMPTSP dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan serta penyelenggaraan pelayanan urusan bidang penanaman modal. Perspektif kedua bersifat *inward looking* yang menunjukkan manfaat bagi *stakeholders* internal DPMPTSP. Penetapan indikator dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran strategis dan kegiatan-kegiatan yang mendukung tujuan strategis. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis, sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran (*output*). IKU DPMPTSP Kabupaten Purworejo dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Kab.Purworejo

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formula Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Realisasi Penanaman Modal	Realisasi Penanaman Modal Tahun Berjalan	DPMPTSP (Sumber data : LKPM)	DPMPTSP

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formula Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	DPMPTSP (Sumber data : hasil survei IKM)	DPMPTSP

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan 2024

1. Kebijakan

- a. Peningkatan kualitas SDM, Sarana Prasarana, Keuangan, Tata kerja dan ketatalaksanaan.
- b. Meningkatkan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal dengan penyederhanaan dan pemberian kemudahan perizinan, mengembangkan Pelayanan Perizinan Terpadu, Pelayanan Perizinan online, promosi investasi, pengendalian dan fasilitasi penanaman modal, peta potensi investasi, data dan sistem informasi penanaman, disertai upaya mitigasi terhadap lingkungan meliputi : Pemantauan / audit lingkungan serta pengawasan / pengetatan perizinan alih fungsi lahan pertanian.

2. Strategi

- a. Meningkatkan dukungan kinerja perangkat daerah melalui SDM, sarana prasarana, keuangan, Tata kerja dan Ketatalaksanaan Penanaman Modal.
- b. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif melalui peningkatan pelayanan perizinan.

2.3 Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024

Struktur program, kegiatan dan sub kegiatan DPMPTSP Tahun 2024 terdiri atas:

1. 1 urusan yaitu urusan penanaman modal

2. 6 program yaitu :
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
 - c. Program Promosi Penanaman Modal;
 - d. Program Pelayanan Penanaman Modal;
 - e. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - f. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
3. 11 kegiatan yaitu :
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - f. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - g. Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
 - h. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan daerah Kabupaten/Kota
 - i. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - j. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - k. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Struktur program, kegiatan dan sub kegiatan DPMPSTSP Tahun 2024 secara rinci dijelaskan pada tabel 2.2.

Tabel 2.2 Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DPMPSTSP
2024

No	Uraian Urusan, Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	
		Target	Realisasi
1	2	3	4
A	Urusan Penanaman Modal	4.129.740.882	3.670.155.642
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.492.744.197	2.389.711.922
a	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.709.000	7.512.400
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.375.000	4.299.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.004.000	918.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	200.000	180.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	240.000	239.100
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	240.000	239.700
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	650.000	636.600
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.000.000	1.000.000

No	Uraian Urusan, Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	
		Target	Realisasi
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.624.996.297	1.560.278.722
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.599.221.297	1.534.644.982
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.000.000	1.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	23.400.000	23.268.540
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.375.000	1.365.200
c	Administrasi Umum Perangkat Daerah	165.275.500	158.386.264
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	165.275.500	158.386.264
d	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	575.688.400	549.214.535
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22.859.250	20.965.250
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	183.873.400	159.780.939
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	368.955.750	368.468.346
e	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	119.075.000	113.994.820

No	Uraian Urusan, Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	
		Target	Realisasi
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	71.850.000	68.714.820
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.325.000	19.250.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	27.900.000	26.030.000
II	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	81.893.720	74.469.925
a	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	20.626.660	17.322.800
	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	20.626.660	17.322.800
b	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	61.267.060	57.147.125
	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	61.267.060	57.147.125
III	Program Promosi Penanaman Modal	277.716.990	241.279.526

No	Uraian Urusan, Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	
		Target	Realisasi
a	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan daerah Kabupaten/Kota	277.716.990	241.279.526
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	277.716.990	241.279.526
IV	Program Pelayanan Penanaman Modal	413.711.450	408.666.905
a	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	413.711.450	408.666.905
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	2.500.000	2.432.200
	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	256.687.250	254.718.711
	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	58.494.700	56.519.352
	Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	96.029.500	94.996.642

No	Uraian Urusan, Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	
		Target	Realisasi
V	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	798.985.000	494.037.340
a	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	798.985.000	494.037.340
	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Usahanya	119.847.000	95.037.000
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	439.443.000	352.404.340
	Pengawasan Penanaman Modal	239.695.000	46.596.000
VI	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	64.689.525	62.315.205
a	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	64.689.525	62.315.205
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	64.689.525	62.315.205

2.4 Perjanjian Kinerja tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bupati Purworejo sebagai berikut:

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Eselon II Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Realisasi Penanaman Modal	81,86 M
2	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	88

Dengan rincian anggaran per program sebagai berikut :

No	Program	Anggaran (Rp)	Sumber Dana
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	81.893.720	APBD
2	Program Promosi Penanaman Modal	277.716.990	APBD
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	413.711.450	APBD
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	798.985.000	DAKNF
5	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	64.689.525	APBD

No	Program	Anggaran (Rp)	Sumber Dana
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.492.744.197	APBD

Jumlah Anggaran Belanja DPMPTSP untuk Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar Rp 4.129.740.882,00.

Dalam mencapai target kinerja, Kepala Dinas didukung oleh 6 Program yang merupakan Perjanjian Kinerja antara Kepala DPMPTSP dengan pejabat eselon III di lingkungan DPMPTSP.

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Eselon III Tahun 2024

NO	Eselon III	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024
1.	Sekretaris	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	%	100
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Pertumbuhan Jumlah Kepeminatan Penanaman Modal	%	5
		Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Nomor Induk Berusaha yang Terbit terhadap Jumlah Kepeminatan	%	99,5
		Program Pelayanan	Persentase Pelayanan	%	100

NO	Eselon III	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024
		Penanaman Modal	Penanaman Modal sesuai Norma Standar Prosedur dan Kriteria		
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha yang memenuhi Ketentuan NSPK	%	100
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Jenis data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Disediakan	%	100

Dengan rincian anggaran per kegiatan sebagai berikut :

No	Program	Anggaran (Rp)	Sumber Dana
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.709.000	APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.624.996.297	APBD
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	165.275.500	APBD
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	575.688.400	APBD

No	Program	Anggaran (Rp)	Sumber Dana
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	119.075.000	APBD
6	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	20.626.660	APBD
7	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	61.267.060	APBD
8	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan daerah Kabupaten/Kota	277.716.990	APBD
9	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	413.711.450	APBD
10	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	798.985.000	DAKNF
11	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	64.689.525	APBD

Adapun rincian kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung capaian kinerja program dan merupakan perjanjian kinerja antara Pejabat Eselon III dengan Pejabat Eselon IV sebagai berikut

Tabel 2.5. Perjanjian Kinerja Eselon IV Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target
1.	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	16
		Tersusunnya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1
		Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Dokumen	1

No	Sasaran Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target
		Perubahan RKA-SKPD	Perubahan RKA-SKPD		
		Tersusunnya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Tersusunnya Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1
		Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1
		Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan	Laporan	16

No	Sasaran Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target
		dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
		Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5
2.	Terlayannya Administrasi Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bln	19
		Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan	6

No	Sasaran Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target
		Keuangan Akhir Tahun SKPD	Akhir Tahun SKPD		
		Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	24
		Tersusunnya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	2
3.	Terlayannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan hasil penyelenggaraan rapat koordinasi dan	Laporan hasil penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	1

No	Sasaran Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target
		konsultasi SKPD			
4.	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1
		Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1
		Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1
5	Terpeliharanya Barang Milik Daerah (BMD)	Terpeliharanya Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan	Unit	8

No	Sasaran Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target
	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara atau dibayarkan Pajaknya		
		Terpeliharanya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1
		Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	80

Dengan rincian anggaran per sub kegiatan sebagai berikut :

NO	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.375.000	APBD
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.004.000	APBD
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	200.000	APBD

NO	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
4.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	240.000	APBD
5.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	240.000	APBD
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	650.000	APBD
7.	Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	1.000.000	APBD
8.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.599.221.297	APBD
9.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.000.000	APBD
10.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	23.400.000	APBD
11.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.375.000	APBD
12.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	165.275.500	APBD
13.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22.859.250	APBD
14.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	183.873.400	APBD
15.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	368.955.750	APBD
16.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	71.850.000	APBD

NO	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
17.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.325.000	APBD
18.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	27.900.000	APBD

2.5 Hasil Tindak Lanjut Tahun 2023

DPMPTSP telah melaksanakan evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja pada tahun 2023 dengan hasil rekomendasi perbaikan dan tindak lanjut yang telah dilaksanakan sebagai berikut

Tabel 2.6 Hasil Tindak Lanjut Tahun 2023

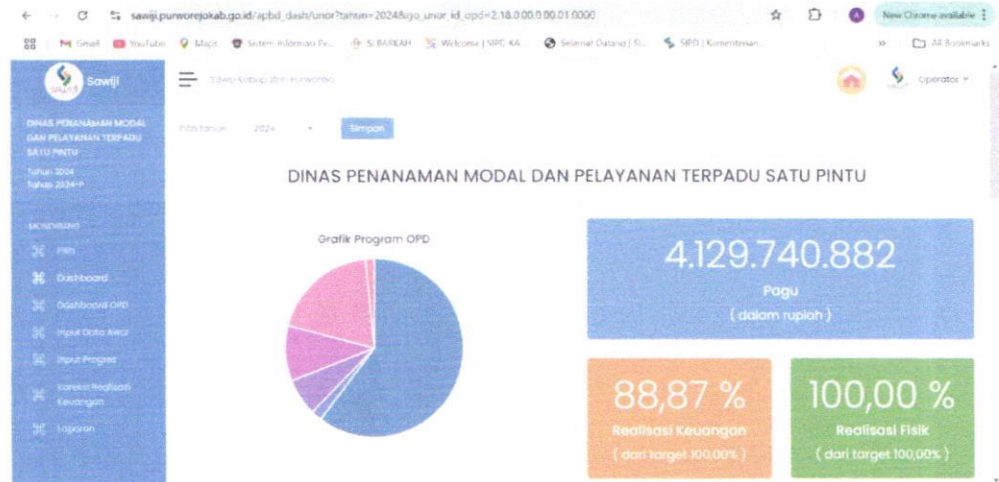
No	Hasil Rekomendasi	Tindak Lanjut
A.	Perencanaan Kinerja	
1.	Mempertahankan setidaknya 5 tahun berturut-turut yang berkaitan dengan dokumen perencanaan kinerja	Menyediakan dokumen perencanaan kinerja dengan lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2.	Mempublikasikan dokumen Perencanaan Kinerja tepat waktu	Mempublikasikan dokumen Perencanaan Kinerja tepat waktu
3.	Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) memenuhi kriteria SMART	Menyediakan dokumen perencanaan kinerja yang memenuhi kriteria SMART
4.	Perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja ditetapkan berdasarkan hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya	Melaksanakan perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja ditetapkan berdasarkan hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya
5.	Perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja	Melaksanakan perbaikan/penyempurnaan

No	Hasil Rekomendasi	Tindak Lanjut
	dapat mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik	Dokumen Perencanaan Kinerja dapat mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik
B.	Pengukuran Kinerja	
1.	Mempertahankan setidaknya 5 tahun berturut-turut yang berkaitan dengan pemenuhan Pengukuran Kinerja	Pemenuhan dokumen terkait pengukuran kinerja
2.	Data kinerja yang dikumpulkan sepenuhnya relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan	Pemenuhan data kinerja yang relevan untuk mengukur capaian kinerja
3.	Data kinerja yang dikumpulkan sepenuhnya mendukung capaian kinerja yang diharapkan	Pemenuhan data kinerja yang mendukung capaian kinerja
4.	Pengukuran Kinerja sepenuhnya dijadikan dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional	Belum dilakukan
5.	Pengukuran kinerja sepenuhnya mempengaruhi penyusunan organisasi (<i>Refocusing</i>)	Belum dilakukan
C.	Pelaporan Kinerja	
1.	Publikasi laporan kinerja dilakukan secara tepat waktu	Publikasi laporan kinerja dilakukan secara tepat waktu
2.	Laporan Kinerja mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja	Laporan kinerja menyajikan seluruh informasi terkait pencapaian kinerja

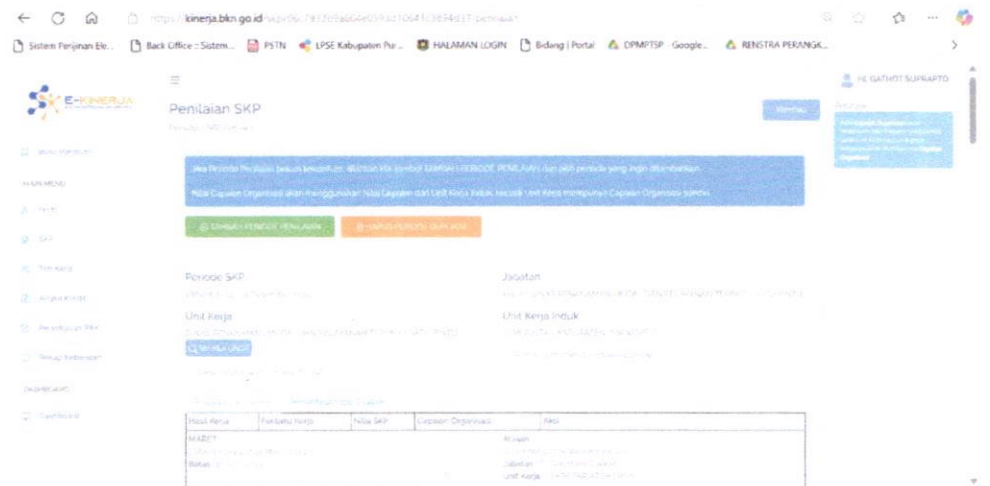
No	Hasil Rekomendasi	Tindak Lanjut
3.	Laporan Kinerja menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah	Laporan kinerja menyajikan seluruh informasi terkait analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah
4.	Laporan Kinerja menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya	Laporan kinerja menyajikan seluruh informasi terkait analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya
D.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	
1.	Peningkatan pendalaman materi terkait evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Mengikuti sosialisasi terkait penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah
2.	Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya ditindaklanjuti	Memaksimalkan pemenuhan terhadap rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas
3.	Belum sepenuhnya terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal	Memaksimalkan pemenuhan terhadap rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas

2.6 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

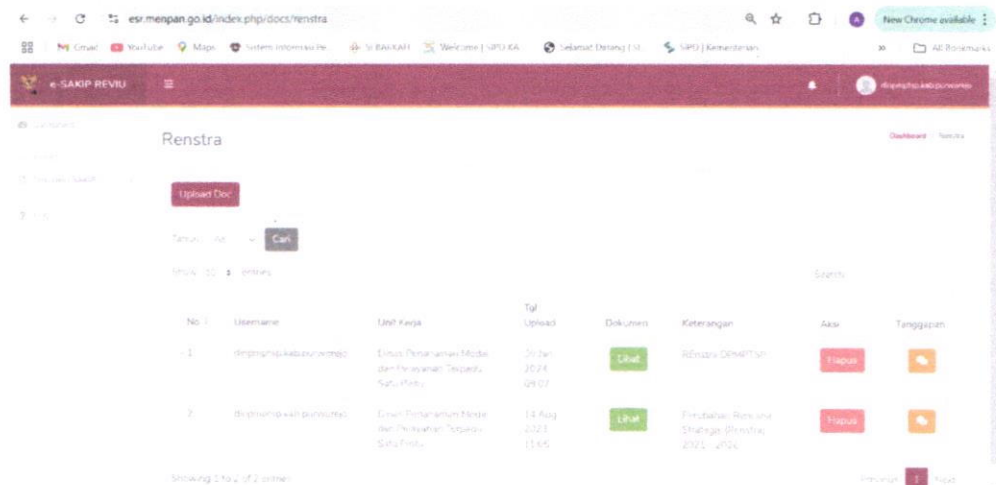
1. SAWIJI



2. E-KINERJA BKN



3. ESR MENPAN



BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2024

3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 3.1 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Formula
1	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Realisasi Penanaman Modal	Realisasi Penanaman Modal Tahun Berjalan	Realisasi PMDN tahun n + Realisasi PMA tahun n
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah

Tabel 3.2 Target dan Realisasi

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2023	2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Realisasi Penanaman Modal	139,204 M	81,85 M	133,14 M *	162,67
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	95,61	88	95,91	108,99

Keterangan * : angka sementara (masih menunggu rilis dari BKPM)

Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, capaian Nilai Peringkat Kinerja DPMPSTSP memenuhi Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja yang sangat baik.

Tabel 3.3 Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 1 : Realisasi Penanaman Modal

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal		Pertumbuhan jumlah kepeminatan penanaman modal (letter of intents dan nomor induk berusaha) dari tahun n-1 ke tahun n	5%	5%	100
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Ketersediaan Regulasi Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Peta potensi dan Peluang Usaha Kabupaten	1 Dokumen	1 Dokumen	100

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100
Program Promosi Penanaman Modal		Persentase Nomor Induk Berusaha yang Terbit terhadap Jumlah Kepeminatan	99,5%	99,5%	100
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan daerah Kabupaten/Kota	Persentase Izin Usaha Terhadap Jumlah Kepeminatan Penanaman Modal	99,5%	99,5%	100
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100
Program Pelayanan Penanaman Modal		Persentase Pelayanan Penanaman Modal sesuai Norma Standar Prosedur dan Kriteria	100%	100%	100
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara	Persentase Pelayanan Penanaman Modal Sesuai	100%	100%	100

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Standar Operasional Pelayanan			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	2500 Pelaku Usaha	2500 Pelaku Usaha	100

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	30 Pelaku Usaha	30 Pelaku Usaha	100
	Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	30 Kegiatan Usaha	30 Kegiatan Usaha	100
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		Persentase Pelaku Usaha yang Memenuhi Ketentuan NSPK	100%	100%	100
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Usaha yang memenuhi Ketentuan Perizinan	100%	100%	100

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Usahanya	Hasil perhitungan jumlah pelaku usaha yang memenuhi NSPK terhadap jumlah pelaku usaha yang berizin (memiliki NIB) tahun yang sama	15 Kegiatan Usaha	15 Kegiatan Usaha	100
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	453 Pelaku Usaha	439 Pelaku Usaha	96,9
	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	28 Kegiatan Usaha	29 Kegiatan Usaha	103,6
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal		Hasil perhitungan jumlah jenis data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang tersedia terhadap dengan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang seharusnya	100 %	100 %	100

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
		tersedia pada tahun yang sama (jenis data dan informasi dihitung berdasarkan jumlah layanan yang dilaksanakan)			
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Data informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4 Dokumen	4 Dokumen	100

Tabel 3.4 Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 2 : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Hasil perhitungan kegiatan layanan penunjang urusan yang dilaksanakan terhadap seluruh kegiatan layanan penunjang urusan yang direncanakan pada tahun yang sama	100%	100%	100
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16 Dokumen	16 Dokumen	100
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
		Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan	16 Laporan	16 Laporan	100

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/Bulan	19 Orang/Bulan	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	6 Laporan	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	24 Laporan	24 Laporan	100

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan	3 Laporan	100

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	2 Jenis	2 Jenis	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	8 Unit	100

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	80 Unit	80 Unit	100

3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Tabel 3.5 Capaian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Baseline 2021	Target			Realisasi			Target Akhir RPJMD	Target Akhir RPJMD (%)
					2022	2023	2024	2022	2023	2024		
1.	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Realisasi Penanaman Modal	Milyar	45,79	67,65	74,41	81,85	71,24	139,2	133,14	99	134,48
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	88	88	88	88	94,43	95,61	95,91	88	108,99

3.1.3 Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada tahun 2024 target kinerja sasaran DPMPTSP terlampaui sebesar 134,48% untuk capaian realisasi penanaman modal dan 108,99% untuk capaian IKM. Namun pada pencapaian target program terdapat beberapa kendala sebagai berikut :

- a. Terdapat titik jenuh NIB;
- b. Belum dilakukannya pemetaan permasalahan dari sisi calon penanam modal/ investor yang akan berinvestasi;
- c. Keterbatasan investor baru yang berinvestasi dalam jumlah besar;
- d. Belum disahkannya Peraturan Bupati Pelaksanaan Perda Penanaman Modal.

Sedangkan disisi lain terdapat faktor pendorong pencapaian target sasaran yaitu :

- a. Pengoptimalan kegiatan bimsos LKPM untuk mendorong pelaporan LKPM oleh pelaku usaha;
- b. Adanya digitalisasi peta potensi penanaman modal yang memudahkan calon investor.

3.1.4 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Capaian realisasi keuangan DPMPTSP tahun 2024 sebesar 88,87% diantaranya disebabkan adanya sisa pengadaan barang/jasa. Pengadaan barang/jasa menggunakan metode *e-purchasing* dengan memilih harga terbaik untuk harga satuan barang/jasa yang tersedia pada e-katalog LPSE.

3.1.5 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Seluruh program/kegiatan DPMPTSP mendukung secara langsung keberhasilan pencapaian kinerja sasaran DPMPTSP.

3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2024

No	Uraian Urusan, Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran		Capaian %
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
A	Urusan Penanaman Modal	4.129.740.882	3.670.155.642	88,87
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.492.744.197	2.389.711.922	95,85
a	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.709.000	7.512.400	97,45
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.375.000	4.299.000	98,26
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.004.000	918.000	91,43
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	200.000	180.000	90,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	240.000	239.100	99,63
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	240.000	239.700	99,88
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	650.000	636.600	97,94
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.000.000	1.000.000	100,00
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.624.996.297	1.560.278.722	96,02
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.599.221.297	1.534.644.982	95,96
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.000.000	1.000.000	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	23.400.000	23.268.540	99,44
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.375.000	1.365.200	99,29
c	Administrasi Umum Perangkat Daerah	165.275.500	158.386.264	95,83
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	165.275.500	158.386.264	95,83
d	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	575.688.400	549.214.535	95,40
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22.859.250	20.965.250	91,71
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	183.873.400	159.780.939	86,90

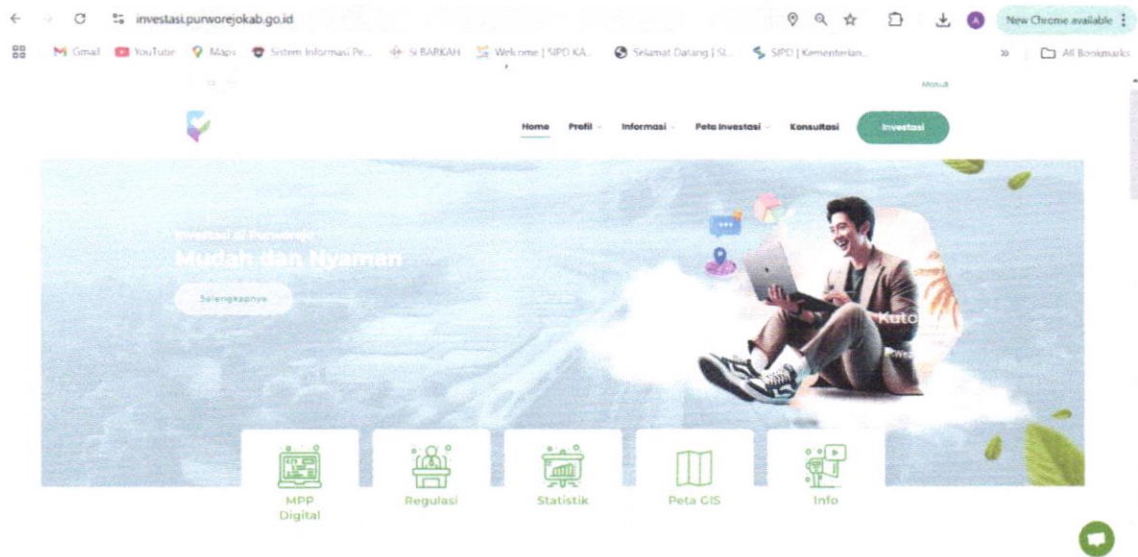
No	Uraian Urusan, Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran		Capaian %
		Target	Realisasi	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	368.955.750	368.468.346	99,87
e	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	119.075.000	113.994.820	95,73
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	71.850.000	68.714.820	95,64
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.325.000	19.250.000	99,61
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	27.900.000	26.030.000	93,30
II	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	81.893.720	74.469.925	90,93
a	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	20.626.660	17.322.800	83,98
	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	20.626.660	17.322.800	83,98
b	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	61.267.060	57.147.125	93,28
	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	61.267.060	57.147.125	93,28
III	Program Promosi Penanaman Modal	277.716.990	241.279.526	86,88
a	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan daerah Kabupaten/Kota	277.716.990	241.279.526	86,88
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	277.716.990	241.279.526	86,88
IV	Program Pelayanan Penanaman Modal	413.711.450	408.666.905	98,78
a	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	413.711.450	408.666.905	98,78

No	Uraian Urusan, Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran		Capaian %
		Target	Realisasi	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	2.500.000	2.432.200	97,29
	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	256.687.250	254.718.711	99,23
	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	58.494.700	56.519.352	96,62
	Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	96.029.500	94.996.642	98,92
V	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	798.985.000	494.037.340	61,83
a	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	798.985.000	494.037.340	61,83
	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Usahanya	119.847.000	95.037.000	79,30
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	439.443.000	352.404.340	80,19
	Pengawasan Penanaman Modal	239.695.000	46.596.000	19,44
VI	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	64.689.525	62.315.205	96,33
a	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	64.689.525	62.315.205	96,33
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	64.689.525	62.315.205	96,33

3.3 Inovasi

Inovasi yang diciptakan oleh DPMPTSP di tahun 2024 adalah Purworejo Investment Center (PIC) yang telah dilaunching pada tanggal 5 Desember 2024. Purworejo Investment Center (PIC) merupakan salah satu upaya DPMPTSP Kabupaten Purworejo untuk meningkatkan realisasi penanaman modal di wilayah Kabupaten Purworejo dengan memudahkan calon investor

dalam mengakses peta potensi investasi dan kesesuaian tata ruang wilayah. Purworejo Investment Center (PIC) merupakan hasil kolaborasi DPMPSTP Kabupaten Purworejo dan seluruh dinas terkait yang berada di wilayah Kabupaten Purworejo.



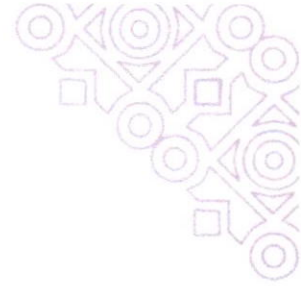
3.4 Penghargaan

Selama tahun 2024, DPMPSTP memperoleh 2 penghargaan yaitu :

1. Evaluasi Ombudsman RI, dengan meraih nilai 96,83 yang termasuk zona hijau dengan kualitas tertinggi



2. 10 Besar Kompetisi Inovasi Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo



PIAGAM PENGHARGAAN

NOMOR. 400.3.3.4/11.846.2/2024

diberikan untuk inovasi

SI IDA

(Sistem Informasi Perijinan dalam Jaringan)

DPMPTSP Kabupaten Purworejo

sebagai

**10 (SEPULUH) BESAR
KOMPETISI INOVASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024**

Purworejo, 10 Desember 2024

BUPATI PURWOREJO

YULI HASTUTI, S.H.



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan Umum atas Capaian Kinerja

Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DINPMPTSP) Kabupaten Purworejo tahun 2024 :

1. Capaian Kinerja belum maksimal karena terdapat titik jenuh NIB, belum dilakukannya pemetaan permasalahan dari sisi calon penanam modal/ investor yang akan berinvestasi, keterbatasan investor baru yang berinvestasi dalam jumlah besar, dan belum disahkannya Peraturan Bupati Pelaksanaan Perda Penanaman Modal;
2. Capaian keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo pada tahun 2024 dibawah 90%, hal ini disebabkan karena adanya alokasi anggaran gaji untuk penambahan personil ASN yang tidak dapat terealisasikan, penggunaan anggaran sesuai kebutuhan dan adanya sisa pengadaan barang/jasa.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Dalam upaya pencapaian sasaran yang maksimal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memerlukan beberapa langkah perbaikan, antara lain :

1. Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan perangkat daerah terkait untuk mendorong peningkatan penanaman modal di Kabupaten Purworejo;
2. Melakukan survei dan pemetaan permasalahan penghambat kepada calon penanam modal/ investor yang akan berinvestasi;
3. Mengoptimalkan peta potensi penanaman modal digital sebagai media promosi;
4. Mengoptimalkan web Potensi Investasi Regional sebagai sistem informasi satu pintu untuk potensi investasi daerah sekaligus sebagai media promosi;

5. Pelaksanaan kegiatan dan subkegiatan agar memperhatikan definisi dan indikator program serta outcome yang akan dicapai sehingga dapat dirasakan manfaatnya secara konkrit, dan berkontribusi pada pencapaian indikator program, sasaran, dan tujuan perangkat daerah.

Keberhasilan capaian kinerja dalam tahap implementasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo merupakan keberhasilan dalam melakukan upaya-upaya terhadap tercapainya target capaian kinerja yang sudah di rencanakan, namun apabila ada beberapa hal yang belum berhasil dicapai target capaian kinerjanya akan menjadi komitmen bersama pimpinan dan seluruh pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk memperbaiki dan melakukan penyempurnaan-penyempurnaan pada tahun berikutnya.

Purworejo, 29 Januari 2025
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Purworejo



Gathot Suprpto, S.H.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19661223 199403 1 001

LAMPIRAN

1. Daftar referensi
2. SK Tim Penyusun LKjIP 2024
3. SK Tim Evaluasi AKIP
4. SK Penetapan LKjIP
5. PK PD Murni dan Perubahan
6. Laporan realisasi anggaran per program, Kegiatan, Sub Kegiatan PD
7. SK IKU PD
8. Hasil SKM Tahun 2024
9. Hasil realisasi fisik dan keuangan program, kegiatan, subkegiatan
10. Penghargaan dan dokumentasi penghargaan yang diterima PD